

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana informasi sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan, digunakan sebagai pengambilan keputusan dan alat komunikasi bagi pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Tujuan utama dari laporan keuangan seperti dicantumkan dalam PSAK nomor 45 adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 (2010), disebutkan bahwa untuk memenuhi standar kualitas dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut setidaknya harus memiliki karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Aswandi, 2018).

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerjanya kepada publik (Soimah, 2014). Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan

akuntabilitas atas lembaga lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Riandani, 2017). Melalui laporan keuangan dapat diketahui jika suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Idward, 2017).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dasar pemikiran ini berasal dari fakta bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah di berbagai daerah. Salah satunya terjadi pada kualitas laporan keuangan di SKPD Provinsi Bali, dimana dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali, BPK menemukan pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali. Kelemahan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 yang ditemukan BPK yaitu: 1. adanya kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal sebesar Rp4.413.142.374,36; 2. Penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian hibah belum memadai; 3. Penetapan rekening penerimaan dan pengeluaran daerah milik Pemerintah Provinsi Bali belum memadai; 4. Penatausahaan BMD pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai; dan 5. Penyerahan penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan belum balik nama (BPK Bali, 2021).

Berdasarkan fenomena informasi tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan Provinsi Bali masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sehingga pemerintah Provinsi Bali perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi

karakteristik kualitas yang disyaratkan. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentunya membutuhkan SDM yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Beberapa permasalahan yang terjadi di Provinsi Bali membuktikan bahwa masih lemahnya kompetensi SDM dan pengendalian intern yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali selama ini.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang karyawan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga karyawan tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara professional, efektif dan efisien (Astari, 2018). Kompetensi sumber daya manusia yang semakin baik akan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi jika SDM yang dimanfaatkan telah didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diakui, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan, sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (Riandani, 2017). Rismawan (2020) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Maulana dan Napisah (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi

aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian serupa oleh Amalia (2020) juga menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Aswabdi (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas adalah salah satu bentuk kewajiban organisasi dalam menyajikan capaian kinerja dari program kerja melalui media tertentu yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas sebagai dasar pelaporan keuangan dalam organisasi berdasarkan pada hak publik untuk mengetahui dan menerima penjelasan untuk pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Sattu, 2020). Nurida (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja atau kualitas laporan keuangan. Dengan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat secara optimal maka akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas. Idward (2017) memperoleh hasil akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengambilan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rasa tanggungjawab atau akuntabilitas maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Hasil serupa diperoleh dalam penelitian Sattu (2020), Siahaan dan Rosalin (2018), serta Nugraeni dan Budiantara (2015) yang menyatakan ada pengaruh positif antara akuntabilitas kinerja dan kualitas laporan keuangan.

Dalam menyajikan laporan keuangan, pemerintah juga harus memperhatikan kualitas informasi laporan keuangan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi hasil kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2010 tuntas disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut (Susliyanti, 2021).

Penelitian Philadhelphia dkk. (2020) menemukan hasil bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serupa dengan hasil penelitian Amel (2017), Maysaroh (2018), Marisa dkk. (2020) yang menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik standar

akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Aritonang (2018) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten.

Tingginya rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian atau pengawasan internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya manusia pada suatu organisasi yang turut berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan secara dini. SPIP diharapkan dapat membantu entitas untuk dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar laporan keuangan dapat diandalkan (Amalia, 2020).

Riandani (2017) menemukan hasil bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Darwis dan Meliana (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan, demikian pula sebaliknya apabila sistem pengendalian internalnya tidak baik maka kualitas laporan keuangan juga akan tidak baik. Penelitian serupa oleh Maulana dan Napisah

(2021), Rismawan (2020), Astari (2018) serta Triyanti (2017) menunjukkan hasil pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Philadhelphia dkk. (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor penentu lainnya yang dapat menentukan tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu atau dengan kata lain lebih berkualitas (Rismawan, 2020). Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan *multiprosecessing* (Armel, 2017).

Pada Instansi Pemerintahan yang menganut sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), kualitas pelaporan keuangan juga menunjukkan kinerja dari instansi tersebut. Penyajian laporan keuangan akan menggambarkan dan menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu instansi pemerintah yang juga menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah

BKKBN dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Program Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen, dukungan, dan sinergitras antara pemerintah, pemerintah daerah, dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah. Prasyarat tersebut adalah dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat baik di perkotaan maupun perdesaan, termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dapat merasakannya. Visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, rumusan Program/Kegiatan yang dirancang dalam Renstra BKKBN 2020-2024 telah memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu strategis yang berkembang sehingga pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan memberi manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

Melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Program Bangga Kencana merupakan pelaksanaan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah mendapat dukungan penganggaran melalui DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana bagi kabupaten dan kota. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu melalui Program Bangga Kencana, terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, yaitu untuk menurunkan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR), dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2021, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk 3 (tiga) area yaitu: sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota. Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam mendukung penurunan TFR menjadi 2,1 pada akhir tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan pada SKPD KB Kabupaten/Kota Se Bali, yang mana SKPD KB Kabupaten/Kota Se Bali ini merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Bangga Kencana di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu untuk menunjang kegiatan Bangga Kencana di Kabupaten/Kota yang tidak bisa di anggarkan oleh APBD, sehingga dianggarkan melalui mekanisme DAK (Dana Alokasi Khusus) baik yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Dasar hukum SKPD KB adalah Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Selanjutnya Undang-Undang yang mengatur tentang SKPD KB adalah UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Fungsi dari SKPD KB adalah menjalankan wewenang dari BKKBN serta menjalankan fungsinya untuk melakukan Penyusunan Rencana Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Keluarga Berencana, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak; Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Alasan penelitian ini dilakukan pada SKPD KB Bali karena SKPD KB pada Pusat Pemerintahan Provinsi Bali sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan BPK RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2020. Akan tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, di antaranya, kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan realisasi belanja barang dan belanja modal lebih saji atau kurang saji dari nilai yang seharusnya.

Pemanfaatan teknologi informasi pada SKPD KB Kabupaten Kota Se Bali adalah saat pembuatan laporan anggaran menggunakan aplikasi Morena. Aplikasi Morena yang disebut sistem pelaporan perencanaan mentoring dan evaluasi ini digunakan untuk pelaporan dana alokasi khusus yang telah terealisasi pada periode tertentu. Namun pada saat pelaporan realisasi Dana Alokasi Khusus dengan menggunakan aplikasi morena tersebut, ada beberapa SKPD KB di kabupaten/kota yang masih mengalami kendala dalam sistematika pelaporannya sehingga

menimbulkan kesalahan dalam pelaporan. Fenomena di lapangan juga menunjukkan adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) yang belum terealisasi maksimal terutama yang ada di SKPD KB yang disebut BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Proses penerapan Aplikasi Morena perlu diketahui oleh SKPD KB di Kabupaten/kota di Bali agar penggunaan Aplikasi Morena ini menjadi maksimal dan baik ketika digunakan pada SKPD KB di Kabupaten/kota di Bali. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pemanfaat teknologi informasi dapat mempengaruhi hasil kualitas laporan keuangan.

Hasil uji Dewi dan Yiniasih (2021) menyatakan pemanfaatan teknologi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan bersangkutan. Aritonang (2018) memperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan perangkat-perangkat komputer dan sambungan internet yang memadai sangat membantu para responden dalam penyusunan laporan keuangan SKPD yang nantinya menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian serupa oleh Idward (2017), Maysaroh (2018), Marisa dkk (2020), Amalia dan Retnani (2020) serta Darwis dan Meliana (2020) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil berbeda oleh penelitian Aswandi (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh

negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba, sedangkan penelitian Riandani (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali?
2. Apakah akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali?
4. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas kinerja terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPDKB Kabupaten Kota Se Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD KB Kabupaten Kota Se Bali mampu mendukung dan menjawab teori keagenan dan teori *stewardship*.

2) Manfaat Praktis

Menyampaikan bahwa penerapan kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja,

penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif merupakan salah satu praktek yang sangat penting terutama dalam menjalankan operasi perusahaan agar dapat mencapai kualitas laporan keuangan. Selain itu bagi investor dapat memberikan bukti mengenai pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan dapat juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Manfaat bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar yakni dapat digunakan sebagai informasi dan referensi penelitian selanjutnya yang mengambil masalah yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Agency theory atau teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Mardiasmo (2004:96) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yudhaningsih (2010) menyatakan adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat dalam mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur proporsi pelayanan publik, tetapi juga harus mengikuti aturan dan permintaan pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah terkadang berperilaku tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan *principal* dan agen yang berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan.

Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai principal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011).

Kaitan teori agensi dengan variabel penelitian ini yakni informasi laporan keuangan yang merupakan hal penting bagi berbagai pihak harus memiliki kualitas yang baik karena adanya kepentingan antar agen atau *stakeholder*. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas keuangan dalam suatu organisasi, diantaranya kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif. Semakin tinggi kompetensi SDM, semakin tinggi akuntabilitas kinerja SKPD KB, semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD KB Kabupaten Kota Provinsi Bali, dan semakin tinggi pengawasan internal SKPD KB Kabupaten Kota Provinsi Bali serta semakin tinggi pemanfaatan teknologi

informasi pada SKPD KB Kabupaten Kota Provinsi Bali, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat

2.1.2 Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Donaldson *et al.* (1997) dalam penelitiannya menemukan faktor yang membedakan antara *agency theory* dan *stewardship theory*. Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi.

Pada *agency theory* terjadi hubungan antara *principal* sebagai pemilik dan *agent* sebagai pengelola manajemen serta masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun pada teori *stewardship* (penatalayanan) maka manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan *steward* dan *principal* tidak sama, maka *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentanginya. Hal ini

disebabkan karena *steward* merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku *principal* merupakan pertimbangan yang rasional serta *steward* akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan sangat jelas. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Negara, peran akuntansi sangat diperlukan.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah pusat sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi yang dimana diterbitkan oleh perusahaan yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang

memberikan makna (Lillrank, 2003). Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Ihsanti (2014) laporan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah. Di Indonesia, laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah (Desi dan Ertambang, 2008).

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Tujuan umum laporan keuangan yakni menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan

informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Nurillah,2014).

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode (Diani, 2014). Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan (Herawati, 2014).

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yakni:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

- a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Zuliarti, 2012). Dengan adanya kompetensi sumber daya

manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Wati dkk, 2014). Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Galuh dan Deviani, 2013).

Menurut Yosefrinaldi (2013), sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Sagara, 2015). Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

2.1.6 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Maka semua instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance* (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Akuntabilitas kinerja laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban tentang integritas laporan keuangan, pengungkapan, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah adalah sasaran pertanggung jawaban dari laporan keuangan. Organisasi khususnya dalam ruang lingkup pemerintah wajib untuk melaporkan hasil program kerja yang telah dilaksanakan sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai efisien dan efektif atau sebaliknya. Akuntabilitas dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang) diantaranya perspektif manajemen keuangan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan operasionalnya melalui laporan keuangan. Akuntabilitas sebagai dasar pelaporan keuangan dalam organisasi berdasarkan pada hak publik untuk mengetahui dan menerima penjelasan untuk pengumpulan sumber daya dan penggunaannya (Sattu, 2020).

Idward (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar–benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Indikator akuntabilitas kinerja memiliki ciri–ciri sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah

2.1.7 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual tuntas disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan adalah menggunakan basis akrual. Implementasi dari peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun

daerah secara bertahap menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh laporan keuangan telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut (Susliyanti, 2021).

Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan (Philadhelphia, 2020). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Armel, 2017).

2.1.8 Pengawasan Internal (Sistem Pengendalian Intern)

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Aritonang, 2018). Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel). Pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh badan pengawasan keuangan (BPK).

Unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi:

- 1) Lingkungan pengendalian pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

- 2) Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

- 3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

- 4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan

sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta keandalan data akuntansi dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang ditentukan (Setiyawati, 2013). Sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

2.1.9 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini

menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global (Armel dkk, 2017) .

Dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dikatakan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi akuntansi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu (Artionang, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi akan dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas karena teknologi yang digunakan memiliki kecepatan dan keakuratan dalam menyusun laporan keuangan (Dewi dan Yuniasih, 2021).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang serupa telah dilakukan oleh Sattu (2020) yang meneliti tentang Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada

Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai keuangan di Universitas Hasanuddin. Sampel penelitiannya sebanyak 85 orang pegawai keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Temuan penelitian ini adalah kompetensi SDM berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja, kemudian kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Aswandi (2018) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba di kota Padang. Secara parsial, variabel kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi sama-sama berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba dan variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba di kota Padang.

Nugraeni dan Budiantara (2015) dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja”. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD pemerintah kota Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 75 orang pegawai SKPD.

Terdapat 3 variabel yang digunakan yaitu standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis jalur. Hasilnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Terbentuk struktur baru dari analisis jalur yang didukung oleh bukti empirik.

Nurida (2017) dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh”. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai satuan kerja pemerintah Aceh. Sampel yang diteliti sebanyak 51 orang yang terdiri atas: pejabat kuasa pengguna anggaran, penatausahaan keuangan (PPK) dan bendahara Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan dapat bahwa semua indikator yang diteliti berpengaruh dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, dimana penerapan akuntansi sektor publik (X1), akuntabilitas (X2), dan transparansi (X3) berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Sedangkan secara parsial akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh, akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh.

Siahaan (2018) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”. Populasi dalam penelitian adalah semua pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah

59. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 orang pegawai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, variabel transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Astari (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan”. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 orang pegawai. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Rismawan (2020) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Opd Kabupaten Badung Tahun 2020”. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Badung yang berjumlah 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah sampel sebanyak 68 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji kelayakan model dengan

bantuan program IBM SPSS Statistics Version 24. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung.

Maulana dan Napisah (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran)”. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur pemerintah desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 60 orang aparatur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan pengujian hipotesis uji t dan uji f. Hasil penelitian menunjukkan (1) Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (2) Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (3) Secara Simultan Terdapat Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Darwis dan Meliana (2020) meneliti Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dari penelitian ini adalah para pegawai yang ada di bagian keuangan pada setiap OPD kota Ternate. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 85 orang pegawai. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil

penelitian ini menemukan bahwa 1. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa semakin dimanfaatkan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan akan sangat baik, demikian pula sebaliknya apabila kurang memanfaatkan teknologi informasi akan mengakibatkan kualitas laporan keuangan akan kurang baik. 2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka akan semakin berkualitas laporan keuangan, demikian pula sebaliknya apabila sistem pengendalian internalnya tidak baik maka kualitas laporan keuangan juga akan tidak baik

Riandani (2017) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 30 SKPD. Sampel penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner kepada 49 responden. Metode statistik analisis data yang digunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 16.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Amalia (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Dan Teknologi Infomasi Terhadap Informasi Laporan Keuangan Pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) kota Surabaya, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 22 Dinas dan 4 Badan di OPD di Kota Surabaya. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan: (1) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten tentang pemahaman sistem akuntansi yang baik maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. (2) Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan jika pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan maka dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah. (3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (OPD) yang menangani Sistem Informasi Keuangan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan pemerintah daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada layanan publik..

Sulistiyowati (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sdm Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara bagian keuangan yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Semarang, Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Structural Equation Model (SEM) menggunakan AMOS 21. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern dan terdapat pengaruh positif antara kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Marisa dkk. (2020) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji t, dan uji F. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi masing-masing secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung.

Maysaroh (2018) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Populasi penelitian adalah seluruh pengelola keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) di Provinsi Lampung. Penentuan sampel melalui purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 40 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS Versi 21.00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Idward (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang melaksanakan kegiatannya pada bidang akuntansi/penatausahaan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel di dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), adapun jumlah kuesioner yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 34 buah kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi variabel

kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, namun sistem pengendalian intern mampu memoderasi variabel akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Aritonang (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Dairi)”. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kabupaten Dairi. Sampel penelitian adalah sebanyak 78 responden Hasil analisis metode regresi linier berganda, Uji F, dan uji T diketahui variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Secara parsial, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi namun, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Armeli (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)”. Populasi penelitian terdiri dari 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota

Dumai. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap SKPD. Jumlah sampel adalah sebanyak 99 orang responden. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2) Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan. 3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 4) Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Philadelphiah dkk. (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Populasi penelitian adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Sampel penelitian adalah sebanyak 95 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan, dan good governance mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

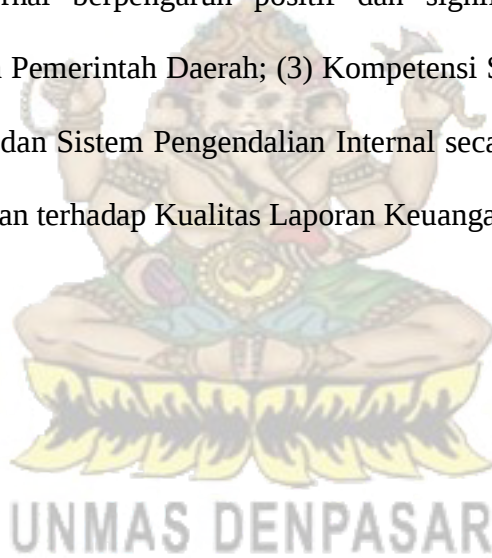
Susliyanti (2021) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Yogyakarta Tahun 2019)”. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja pengelola APBN di wilayah KPPN Yogyakarta. Sampelnya adalah staf atau

pegawai bagian keuangan satuan kerja di wilayah KPPN Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan penerapan SAP dan penerapan good governance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Selain itu secara simultan variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAK dan penerapan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Dewi dan Yuniasih (2021) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Pendidikan, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Mengwi”. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan LPD yang ada di Kecamatan Mengwi, yakni sebanyak 309 orang yang tersebar di 37 LPD, 15 Desa dan 5 Kelurahan di Kecamatan Mengwi. Sampel yang dianalisis sebanyak 113 sampel pada LPD Kecamatan Mengwi. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Triyanti (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan

tugas pengelolaan keuangan yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebanyak 108 responden dari 27 SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan sebanyak 108 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB III

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dengan adanya *research gap* dan *fenomena* kemudian didukung dengan adanya kajian empiris atau penelitian sebelumnya terkait hubungan antar variabel dan mengacu pada landasan teori. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agency. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai suatu hubungan keagenan.

Apabila ditinjau secara lebih spesifik bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* juga berkaitan dengan penelitian ini. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan